

Laporan Temuan Awal  
Pemantauan Politik Uang dan  
Penyalahgunaan Fasilitas dan  
Jabatan Negara dalam Pemilu 2014



Indonesia Corruption Watch  
April 2014

# Prinsip dan asaz Pemilu

- Jujur
- Adil
- Berintegritas

INDONESIA CORRUPTION WATCH

# Pengertian Pemilu

- ❑ Dari sisi rakyat, pemilu adalah mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada mereka yang hendak memegang kekuasaan di pemerintahan.
- ❑ Dari sisi elit, pemilu adalah mekanisme pergantian pemegang kekuasaan, secara periodik dan tertib.
- ❑ Pemilu juga bisa diartikan sebagai mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka, dan beradab.
- ❑ Secara normatif, pemilu diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

# Tujuan Pemilu

## ❑ Keterwakilan Politik

Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda (ideologi, oritensi politik, suku ras agama, dll), sehingga lembaga perwakilan rakyat benar-benar mencerminkan kondisi masyarakatnya

## ❑ Integrasi Nasional

Pemilu adalah sarana untuk mengkanalisasi perbedaan-perbedaan kepentingan yang ada di dalam masyarakat sehingga, potensi konflik dapat diredam dan disalurkan secara efektif lewat lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

## ❑ Pemerintahan Efektif

Pemilu adalah saran untuk membentuk pemerintahan yang efektif, karena pejabat-pejabat yang terpilih mendapat dukungan nyata (ligitimasi) dari masyarakat.

# Isu Korupsi Pemilu

- Korupsi politik :
- Korupsi politik adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin politik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya untuk melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan (Hodess, 2004: 11).
- Dalam suasana persaingan tidak sehat, Politisi secara alamiah berusaha untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan dan otoritasnya (Niskanen, 1973).

# Problem Rendahnya Integritas Pemilu

- Maraknya Praktek Politik Transaksional Negatif (Politik uang)
- Dana Kampanye Haram sebagai Modal Politik
- Penggunaan Fasilitas Negara dan Daerah sebagai Instrumen Pemenangan

INDONESIA CORRUPTION WATCH

# Partisipasi Publik dalam Pengawasan Pemilu

- Merupakan bagian penting partisipasi masyarakat untuk memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan pemilu
- Menjaga kontestasi persaingan yang jujur, adil dan berintegritas
- Melakukan pemantauan secara langsung proses dan tahapan pemilu atas potensi-potensi praktek politik uang dan peyalahgunaan fasilitas dan jabatan pemerintah
- Melakukan upaya hukum pemilu dengan melakukan pelaporan atas semua bentuk pelanggaran politik uang dan peyalahgunaan fasilitas dan jabatan pemerintah yang ditemukan kepada Bawaslu

# Fokus Pemantauan

- Pemantauan Politik ung
- Pemantaun penyalahgunaan fasilitas dan kebijakan pemerintah sebagai instrumen pemenangan
- Pemantauan Dana Kampanye

INDONESIA CORRUPTION WATCH



# Wilayah Pemantauan

- Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

INDONESIA CORRUPTION WATCH

## Mitra Jaringan Pemantauan ICW di 15 Daerah :

LBH Sumatera Barat
Sahdar Sumatera Utara
Fitra Riau
Kabahil Bengkulu
Mata Banten
G2W Jawa Barat
KP2KKN Jawa Tengah
MCW Jawa Timur
Fitra NTB
Bengkel Appek NTT
Gemawan Kalimantan Barat
Yasmib Sulawesi Selatan
Puspaham Sulawesi Tenggara
UPC Jakarta

A large, light blue stylized eye logo with a central circle and curved lines above and below it.

**HASIL PEMANTAUAN**

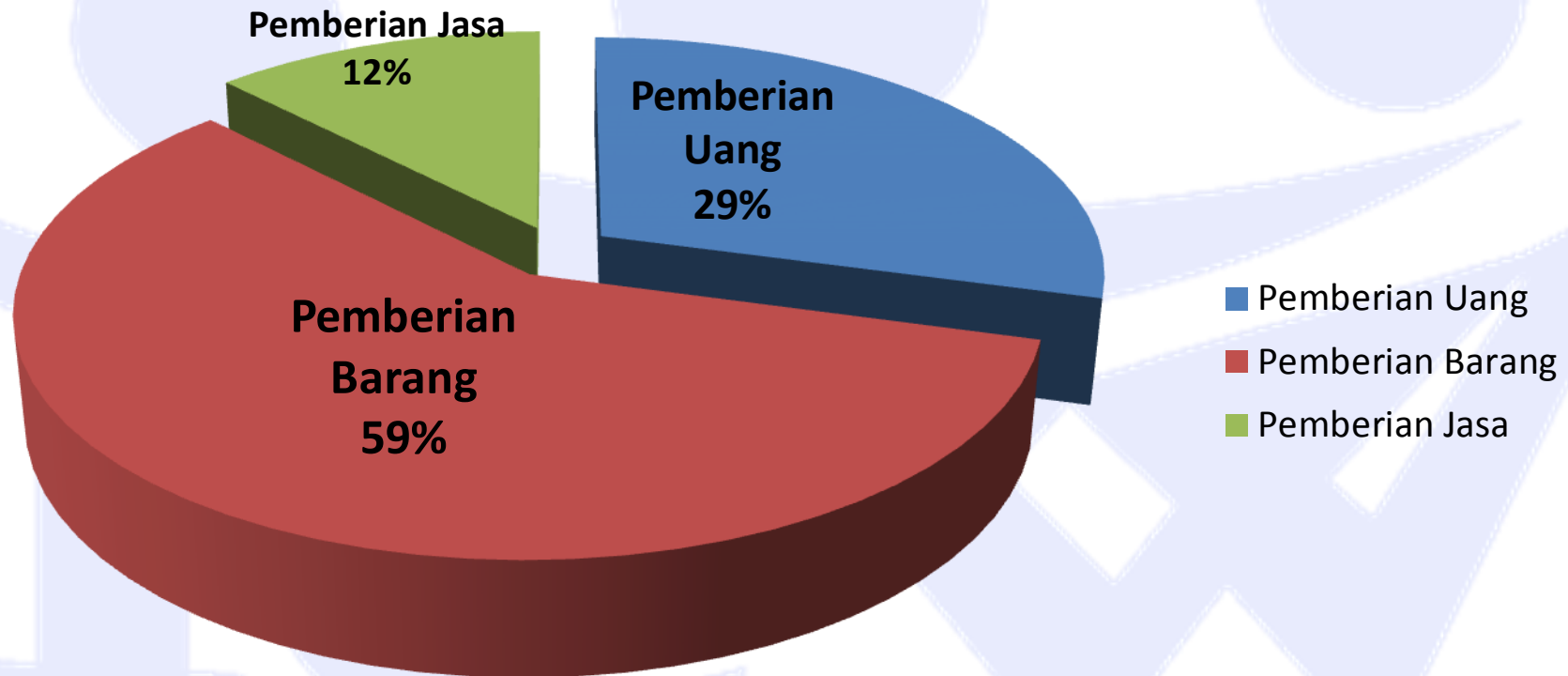
**ICAW**

**INDONESIA CORRUPTION WATCH**

# Jenis Pelanggaran Politik Uang

Jenis Pelanggaran Politik Uang	Jumlah
Pemberian Uang	33
Pemberian Barang	66
Pemberian Jasa	14

# Bentuk Politik Uang

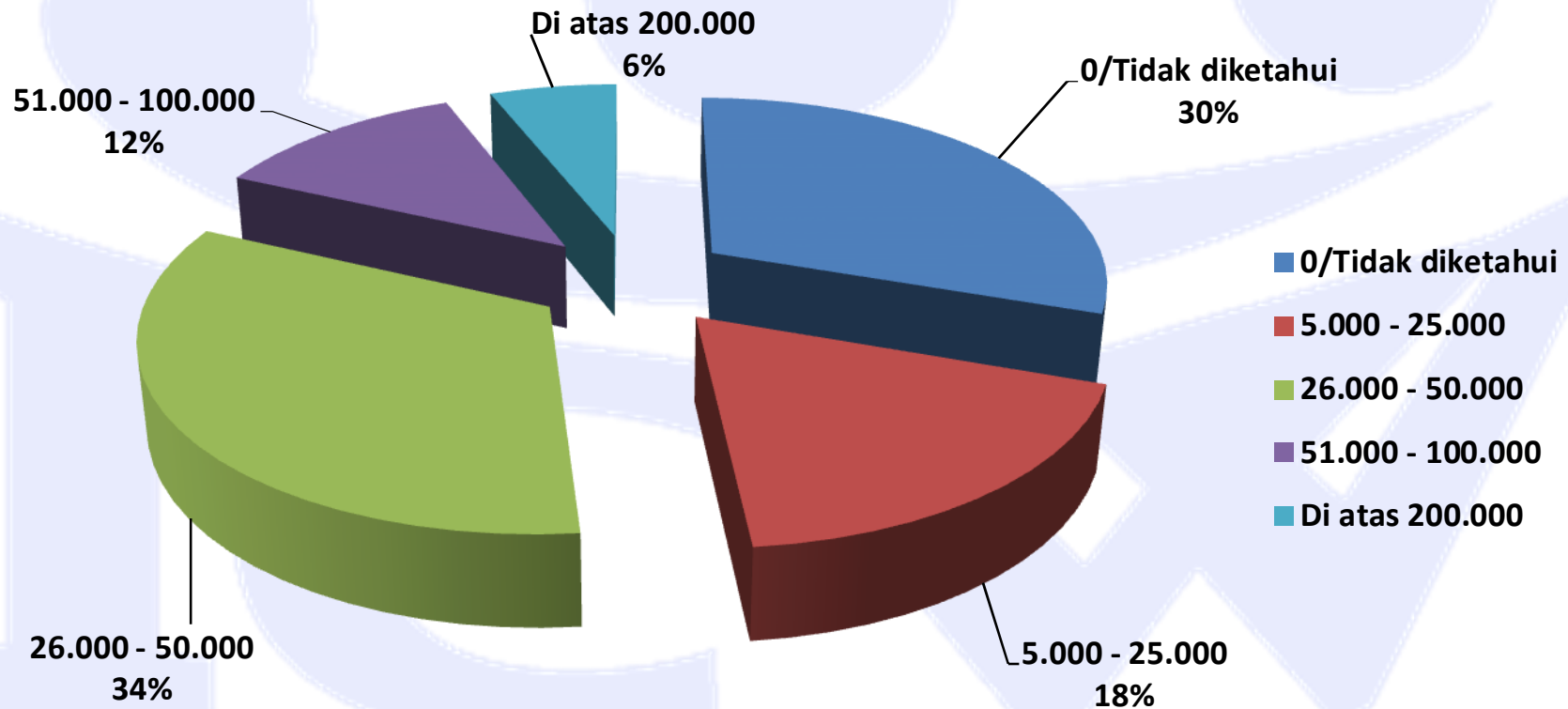


INDONESIA CORRUPTION WATCH

# Jumlah Pemberian Uang dalam Politik Uang

Jumlah Pemberian (Rupiah)	Jumlah
0/Tidak diketahui	10
5.000 – 25.000	6
26.000 – 50.000	11
51.000 – 100.000	4
Di atas 200000	2
0/Tidak diketahui	10

# Nilai Transaksi Politik Uang



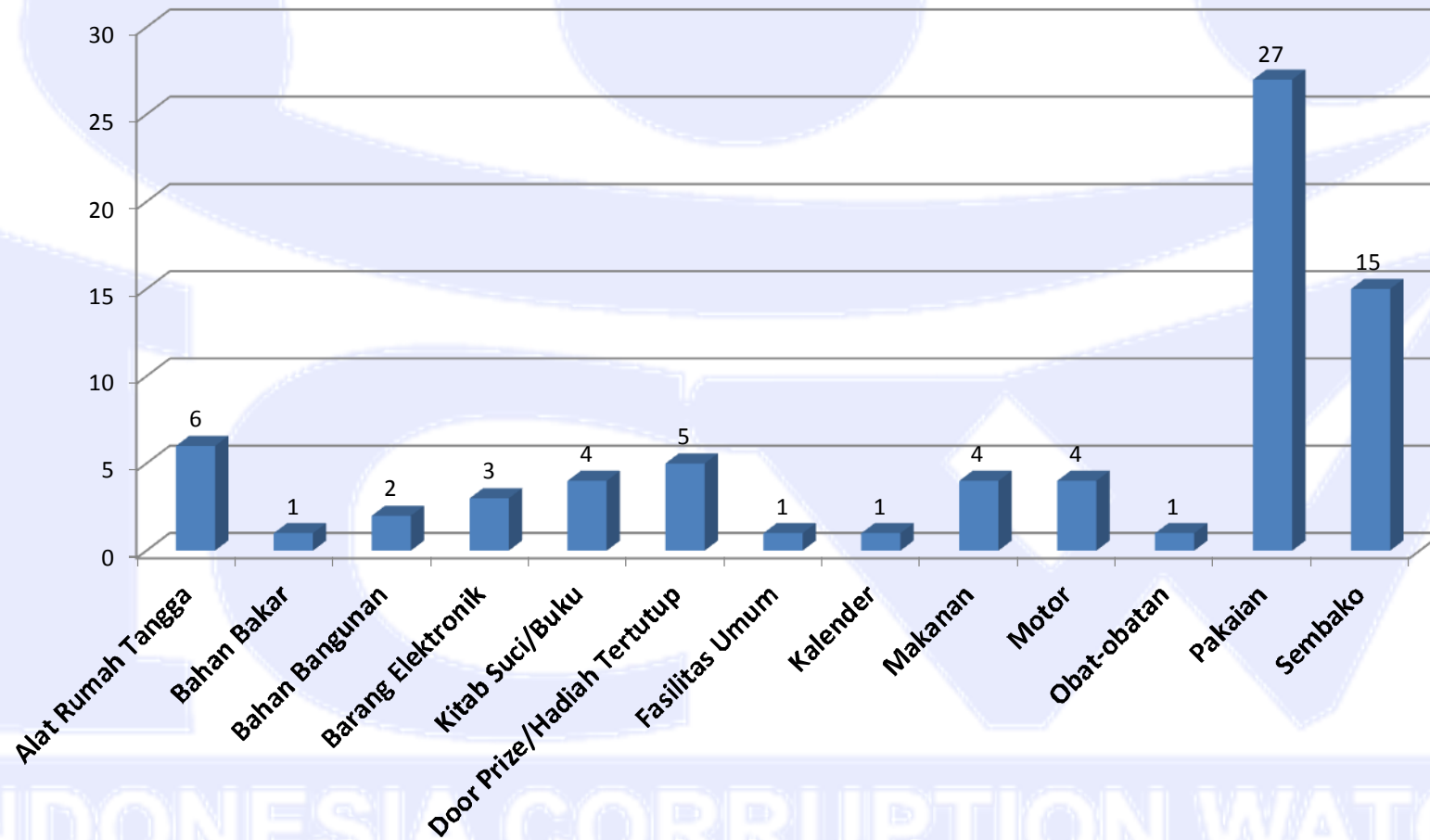
INDONESIA CORRUPTION WATCH

# Bentuk Pemberian Barang

Bentuk Pemberian	Jumlah Temuan
Alat Rumah Tangga	6
Bahan Bakar	1
Bahan Bangunan	2
Barang Elektronik	3
Kitab Suci/Buku	4
Door Prize/Hadiah Tertutup	5
Fasilitas Umum	1
Kalender	1
Makanan	4
Motor	4
Obat-obatan	1
Pakaian	27
Sembako	15



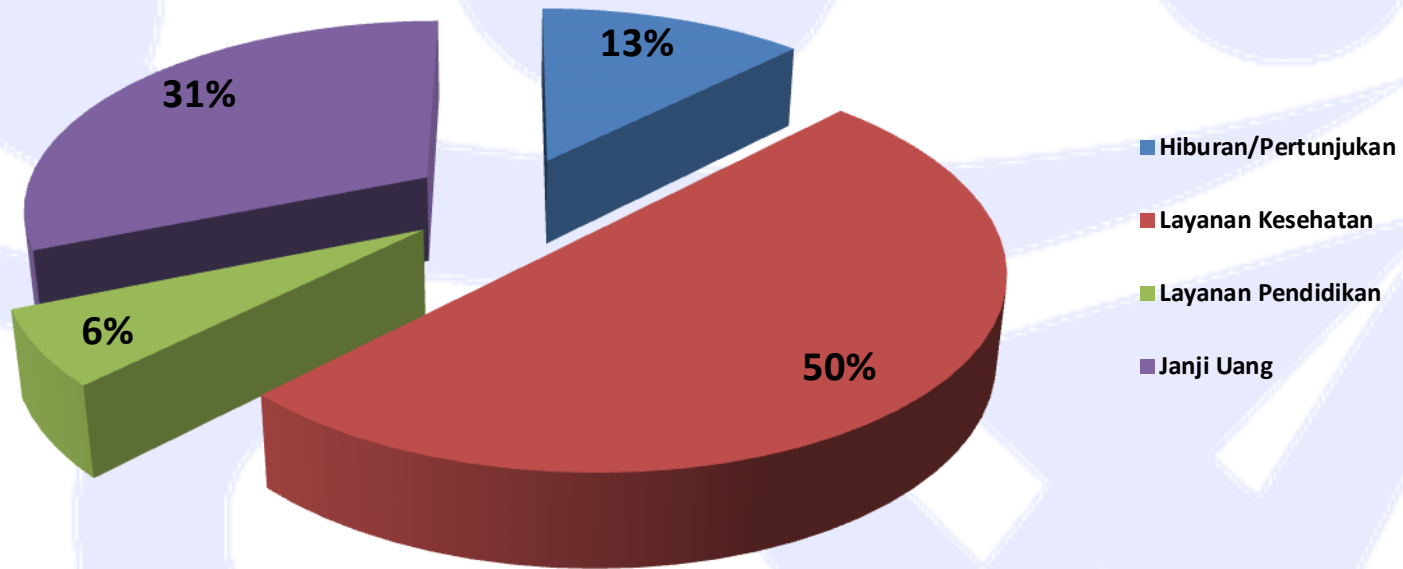
# Grafik Bentuk Barang yang di Transaksikan



# Jenis Politik Uang dalam Bentuk Jasa

Hiburan/Pertunjukan	2
Layanan Kesehatan	8
Layanan Pendidikan	1
Janji Uang	5

# Grafik Persentase Pemberian jasa

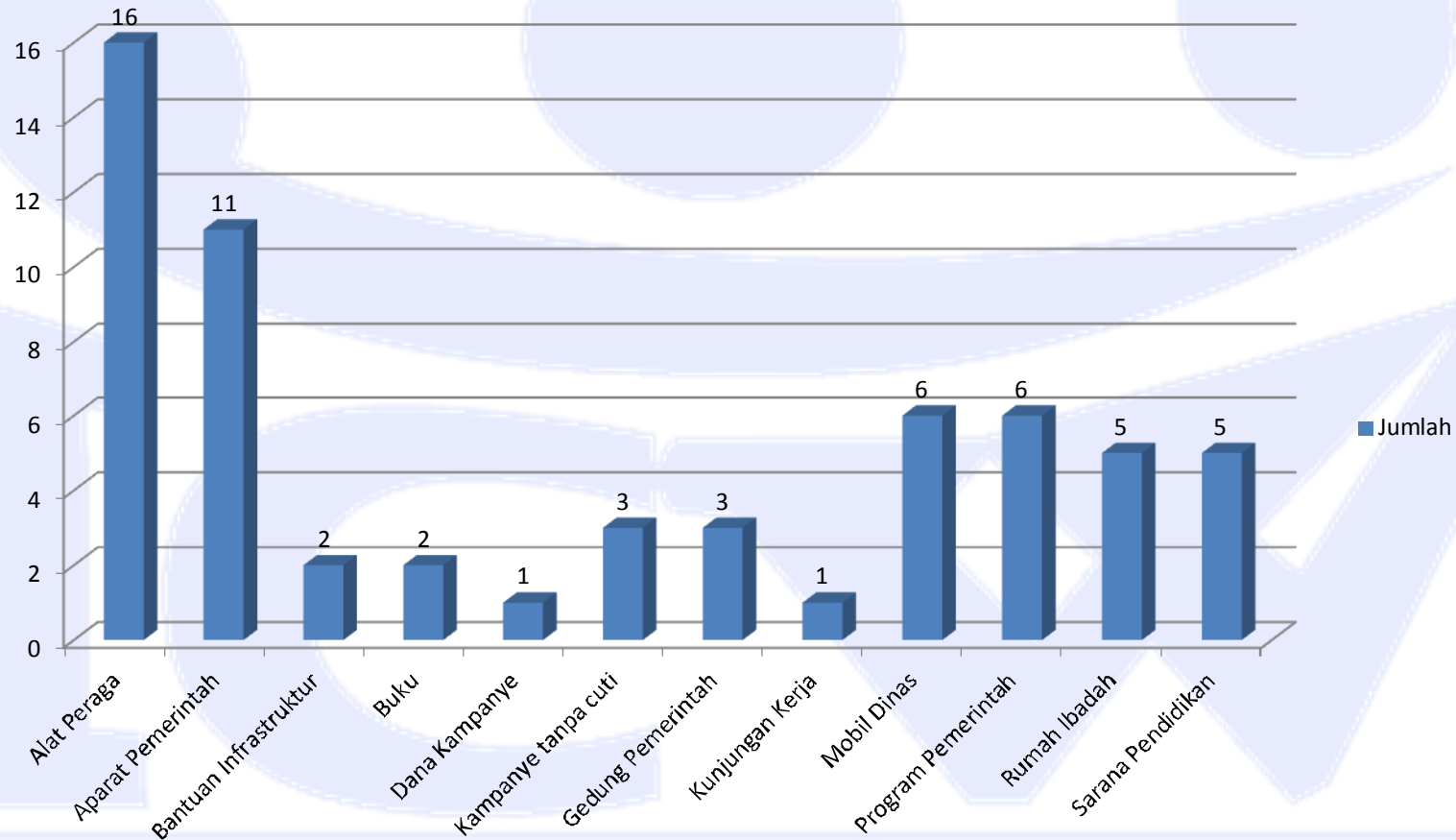


INDONESIA CORRUPTION WATCH

# Penyalahgunaan Fasilitas dan Jabatan dalam Kampanye Pemilu

Pelanggaran Fasilitas dan Jabatan Negara	Jumlah
Alat Peraga	16
Aparat Pemerintah	11
Bantuan Infrastruktur	2
Buku	2
Dana Kampanye	1
Kampanye tanpa cuti	3
Gedung Pemerintah	3
Kunjungan Kerja	1
Mobil Dinas	6
Program Pemerintah	6
Rumah Ibadah	5
Sarana Pendidikan	5

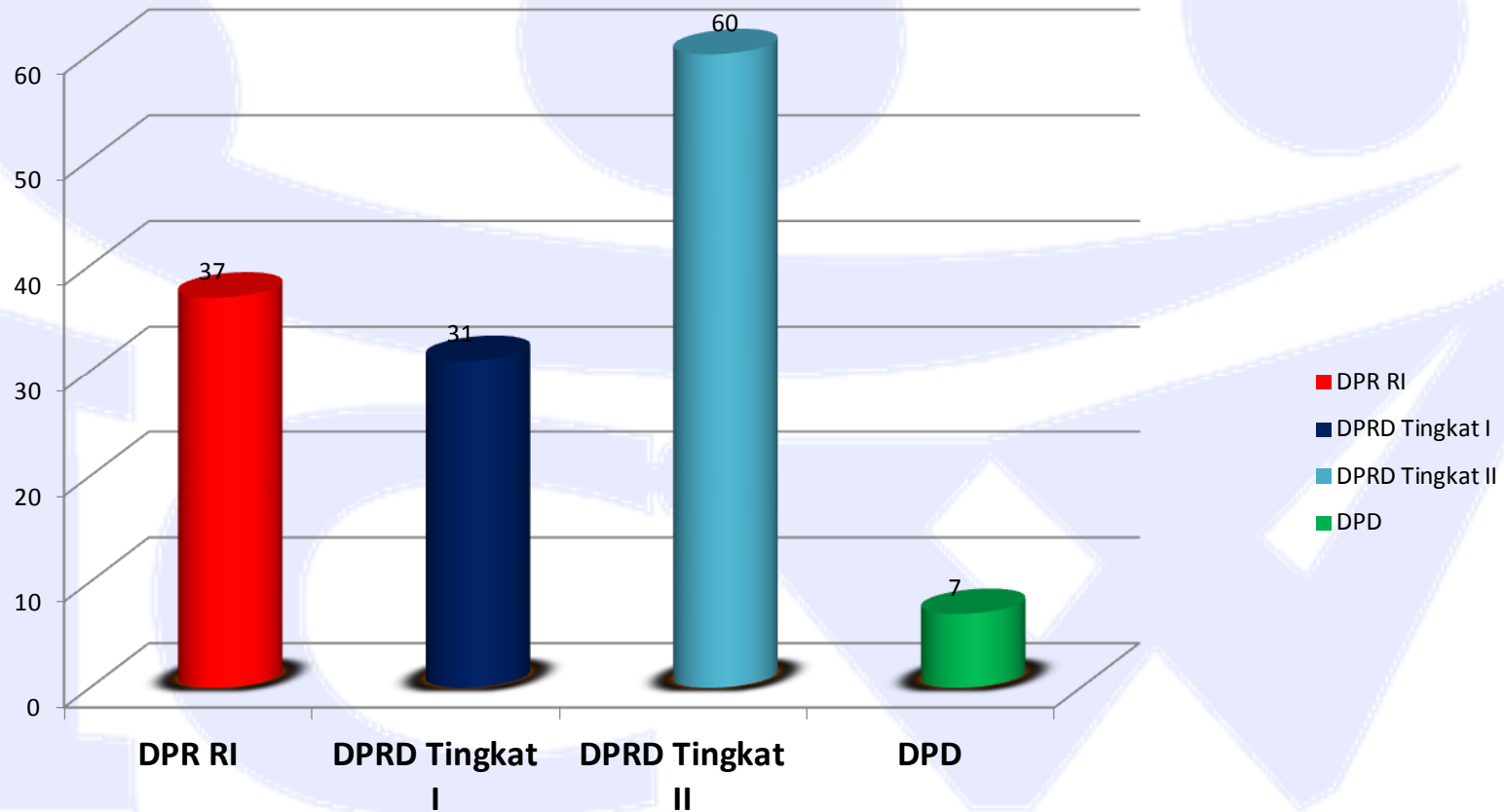
# Penyalahgunaan Fasilitas dan Jabatan dalam Pemilu



# Kasus Politik Uang Berdasarkan Pencalonan

PENCALONAN	JUMLAH KASUS
DPR RI	37
DPRD Tingkat I	31
DPRD Tingkat II	60
DPD	7

# Kasus Politik Uang Berdasarkan Pencalonan

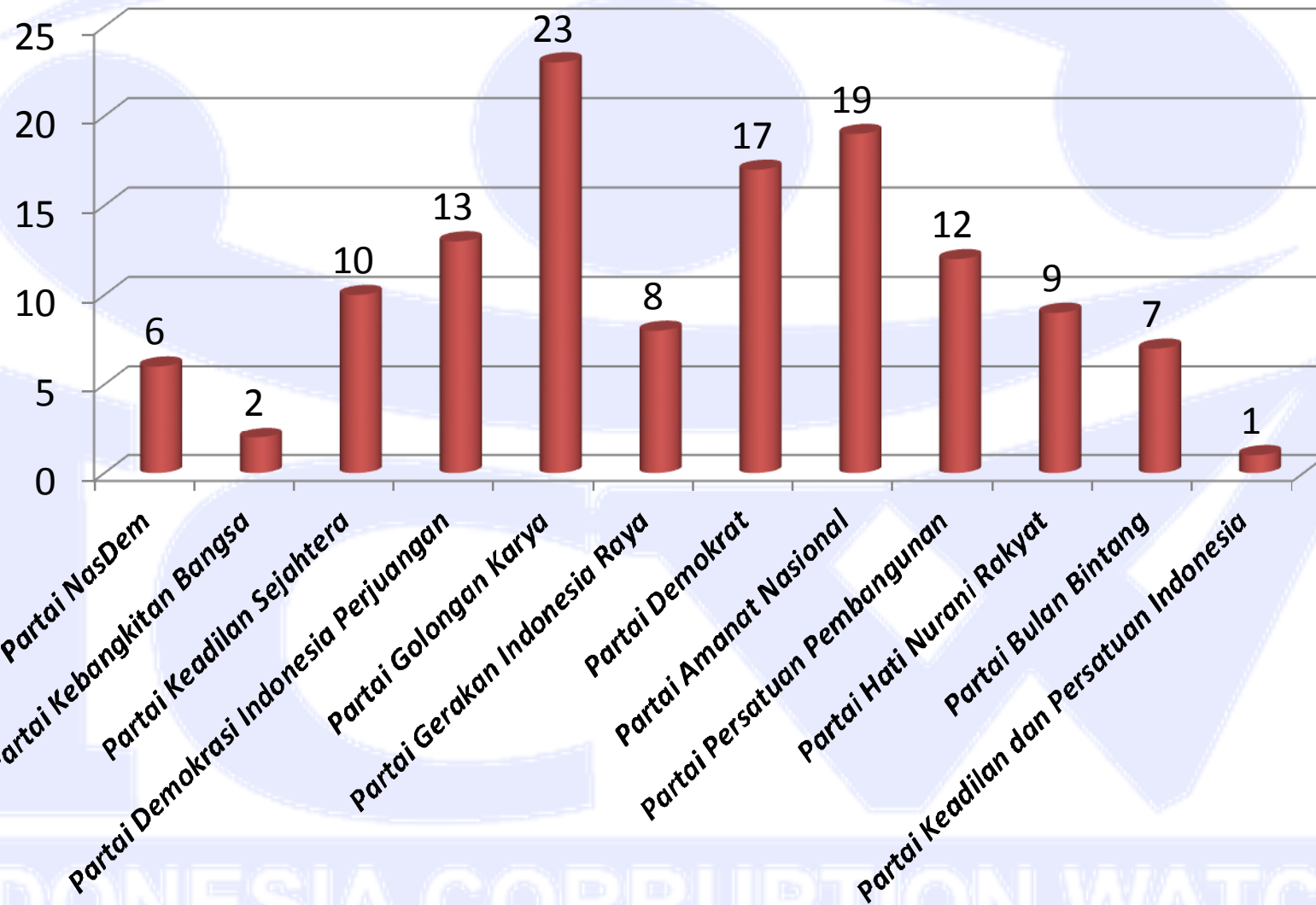


# Partai Vs Jumlah Pelanggaran

Nama Partai	Jumlah Kasus
Partai NasDem	6
Partai Kebangkitan Bangsa	2
Partai Keadilan Sejahtera	10
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13
Partai Golongan Karya	23
Partai Gerakan Indonesia Raya	8
Partai Demokrat	17
Partai Amanat Nasional	19
Partai Persatuan Pembangunan	12
Partai Hati Nurani Rakyat	9
Partai Bulan Bintang	7
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1



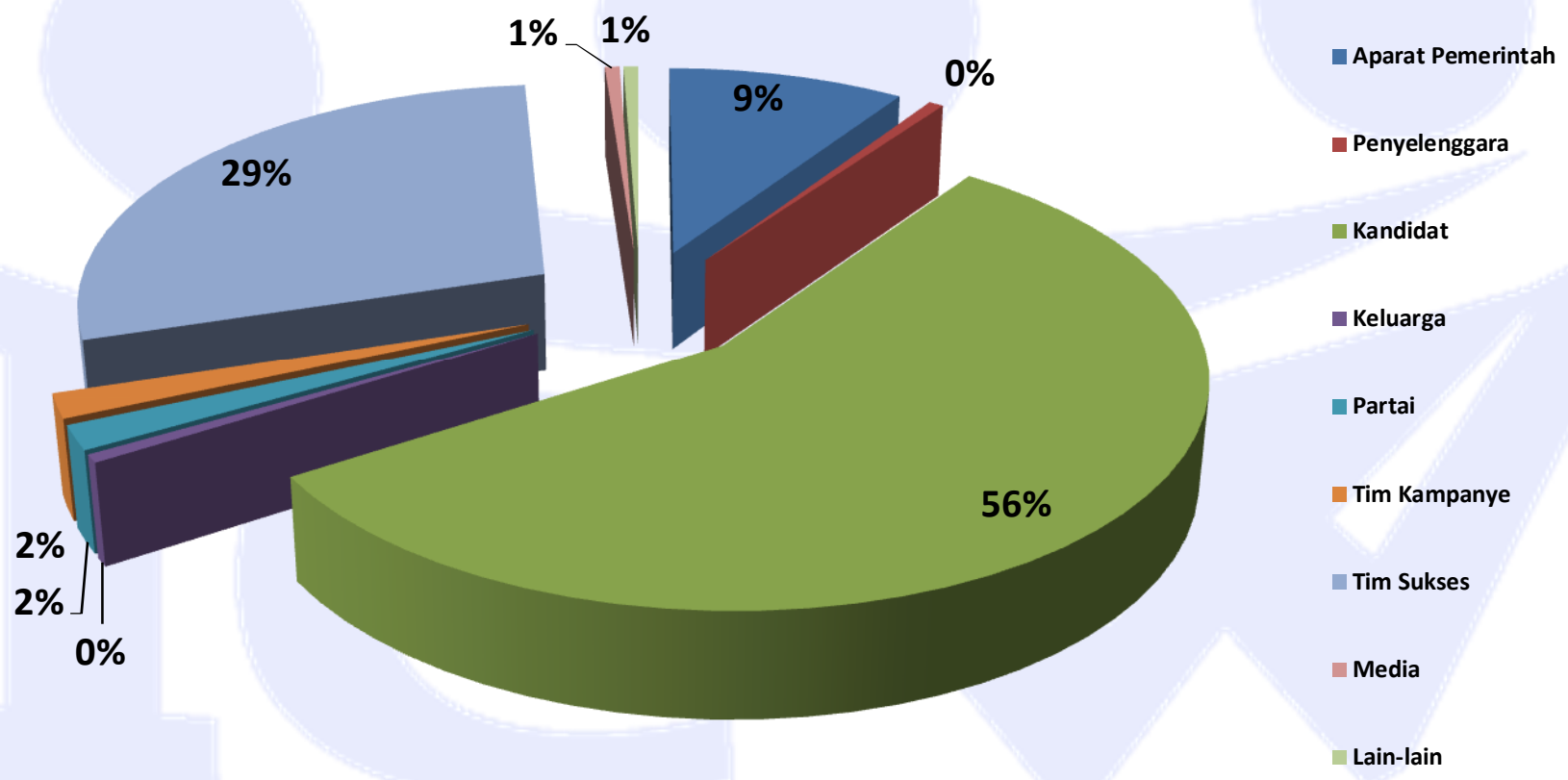
# Jumlah Pelanggaran Oleh Partai Politik



# Aktor Pelaku Politik Uang dan Penyalahgunaan Jabatan dan Fasilitas Negara

Aktor Pelaku	Jumlah
Aparat Pemerintah	16
Penyelenggara	1
Kandidat	96
Keluarga	1
Partai	3
Tim Kampanye	3
Tim Sukses	49
Media	1
Lain-lain	1

# Aktor Pelaku Pelanggaran Politik Uang dan Penyalahgunaan Fasilitas dan Jabatan



# 5 Besar Temuan Berdasarkan Wilayah

Daerah	Temuan Kasus
RIAU	32
Sumatera Utara	18
Banten	16
Sulawesi Selatan	14
Jawa Barat	12

# Kesimpulan

- Partai Politik dan Kandidat masih mengandalkan Praktek Politik Uang dan Penyalahgunaan Fasilitas dan Jabatan negara dalam membangun keterpilihan
- Pola Pemberian Barang dan Uang masih menjadi modus utama dalam praktek politik uang
- Pelaku masih didominasi oleh Kandidat dan Tim sukses
- Praktek Politik Uang Banyak dilakukan oleh Kandidat untuk Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota
- Tindaklanjut atas laporan pemantau oleh Bawaslu dan Panwaslu masih sangat lemah